

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis regresi linier berganda pada data pada rentang 2011-2024, dapat diperoleh kesimpulan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Nilai t hitung sebanyak -12,832 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa setiap kenaikan satu poin IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,923%. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis pertama (H1) diterima dan konsisten dengan teori modal manusia Schultz (1961) bahwa investasi pada kesehatan dan pendidikan secara efektif mampu menekan kemiskinan.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Nilai t hitung sebesar -0,634 pada signifikansi $0,540 > 0,05$ mencerminkan hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini disebabkan tingginya partisipasi kerja di Kabupaten Kebumen didominasi sektor informal dan pertanian subsisten dengan produktivitas rendah, sehingga peningkatan TPAK tidak serta-merta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.
3. Gini Rasio tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Nilai t hitung sebesar 1,335 dengan signifikansi $0,212 > 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Nilai Gini Rasio

Kabupaten Kebumen yang berada pada kategori rendah hingga sedang (0,21-0,354) selama periode pengamatan tidak cukup substansial untuk menghasilkan dampak signifikan pada perubahan tingkat kemiskinan.

Secara simultan, IPM, TPAK, dan Gini Rasio berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan, dengan nilai F hitung $56,495 > F$ tabel $3,71$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai R^2 sebanyak $0,944$ mencerminkan bahwa ketiga variabel independen bisa menjelaskan $94,4\%$ variasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen, sedangkan sisanya $5,6\%$ disebabkan faktor lain di luar model.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen, mengingat IPM terbukti menjadi penentu utama penurunan kemiskinan, pemerintah daerah perlu terus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan memperluas akses sekolah menengah dan vokasi, menaikkan kualitas tenaga pengajar, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar perlu diperkuat secara berkelanjutan agar penurunan kemiskinan dapat dipercepat. Terkait ketenagakerjaan, pemerintah perlu tidak hanya meningkatkan jumlah partisipan angkatan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Pengembangan sektor formal, perluasan program pelatihan vokasional, serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal diperlukan agar peningkatan TPAK benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan. Terkait ketimpangan pendapatan,

meskipun Gini Rasio tidak signifikan secara statistik pada penelitian ini, pemerintah tetap perlu mewaspadai potensi peningkatan ketimpangan, terutama pasca pandemi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, akses kredit usaha mikro, dan bantuan sosial yang tepat sasaran perlu diperkuat agar dampak positif pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.

2. Bagi peneliti berikutnya, dianjurkan memperluas variabel lain yang turut memengaruhi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah di bidang sosial, atau infrastruktur dasar. Di samping itu, pemanfaatan data panel tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dapat memperluas cakupan analisis dan memperkuat generalisasi temuan.